

PERJUANGAN BARU DI ERA BARU

Pada bulan Oktober yang lalu Sakai San mengabarkan bahwa bulan November kawan-kawan korban pembangunan waduk/PLTA Kotopanjang akan melakukan aksi di Jakarta. Respon saya, “Mantap, momen yang tepat, apalagi saat itu adalah hari-hari pertama setelah Jokowi dilantik menjadi presiden”.

Saya memberi respon seperti itu karena perjuangan kita ini mesti dilanjutkan dan pemerintahan Jokowi – yang mengusung slogan “pro-rakyat” – bisa dijadikan tumpangan guna mendukung perjuangan yang belum selesai ini. Namun sayang sekali, karena satu dan lain hal, aksi ke dan di Jakarta tidak bisa direalisasikan. Kabar dari Sakai San, aksi bukan dibatalkan, tapi ditunda. Mudah-mudahan penundaan ini tidak begitu lama. Semakin cepat rencana itu diwujudkan semakin baik, karena kita ingin memanfaatkan momen hari-hari pertama pemerintahan Jokowi yang “pro-rakyat” ini. Kita ingin membuktikan apakah slogan atau moto itu benar adanya, sehingga pemerintahan baru ini memperlihatkan keberpihakannya kepada perjuangan kita, perjuangan para korban pemerintahan di masa lampau, yang bisa dikatakan “tidak berpihak kepada rakyat” (yang menjadi korban pembangunan waduk/PLTA Kotopanjang).

Kita mengharapkan/membutuhkan keberpihakan dari pemerintahan baru ini, tanpa keberpihakan tersebut, perjuangan itu nampaknya tidak akan pernah tuntas. Peran atau keberpihakan pemerintah itu sangat besar artinya. Sistem politik di Indonesia hingga saat sekarang masih mengandung prinsip, “ya kata pemerintah maka jadilah sesuatu, tidak kata pemerintahan maka batallah semua yang direncanakan atau batallah semua yang tengah dikerjakan”.

Di sisi lain, setidaknya ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya pribadi, perjuangan di era baru ini menjadi semakin berat. Berbagai pihak yang berada di luar perjuangan kita sekarang punya “amunisi” baru. Dalam banyak kesempatan mereka sering mengatakan: “Perjuangan apa lagi?” “Tuntutan ganti rugi apa juga lagi yang dimintakan?”. “Apakah tidak dilihat, bahwa berbagai keberhasilan telah wujud pada masyarakat?”, dlsbnya.

Pihak-pihak yang menyampaikan suara seperti ini bahkan juga didukung oleh beberapa media massa yang menampilkan potret “keberhasilan” sebagian warga Kotopanjang. Ini semua, dalam kadar tertentu bisa mempengaruhi berbagai pihak, termasuk pemerintah yang sebetulnya sudah “enggan” juga mengatakan keberpihakannya kepada kita.

Berdasarkan realitas di atas, perjuangan kita saat sekarang terasa semakin berat, penjelasan-penjelasan kepada berbagai pihak, termasuk juga pemerintah harus semakin lengkap dan komprehensif, sebab bila kita gagal menjelaskannya, apalagi hanya mengangkat atau mengulangi isu-isu lama (yang hanya cocok untuk masa-masa awal pembangunan waduk/PLTA) suara kita tidak akan kuat lagi gema atau gaungnya.

Dibutuhkan kecerdasan (baru) untuk menyuarakan bahwa penderitaan akibat pembangunan waduk/PLTA ini sebetulnya masih akut di tengah masyarakat. “Keberhasilan” yang diperoleh segelintir warga Kotopanjang dewasa ini bukanlah didapat karena pembuatan waduk/PLTA semata. Dan masih banyak (dan sangat banyak) warga yang sesungguhnya masih menderita (dan lebih menderita) akibat pembangunan itu. Semoga kita dengan semangat baru dan kecerdasan baru mampu menjelaskan ini semua kepada pemerintah baru khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. SEMOGA

Salam perjuangan,
Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan